

NEGARA HUKUM

Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan

VOL. 9 NO. 1, JUNI 2018

ISSN: 2087-295X

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	iii-vi
Abstrak.....	vii-xviii
Pelindungan HAM dalam Prosedur Penentuan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris di Indonesia <i>Marfuatul Latifah</i>	1-17
Operasi Tangkap Tangan dalam Penanganan Kasus Korupsi <i>Puteri Hikmawati</i>	19-38
Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual pada Produk Ekonomi Kreatif <i>Sulasi Rongiyati</i>	39-58
Implikasi Bentuk Hukum BUMD terhadap Pengelolaan BUMD <i>Dian Cahyaningrum</i>	59-78
Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia <i>Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata</i>	79-100
Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 dalam Mengatasi Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi <i>Budi Suhariyanto</i>	101-120
Pedoman Penulisan	

PENGANTAR REDAKSI

Pada bulan Juni 2018 ini Jurnal Ilmiah Negara Hukum kembali terbit, dimana para penulis menuangkan ide dan gagasannya dalam bentuk hasil penelitian dan kajian terhadap berbagai masalah hukum, dengan tujuan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum. Sebagai jurnal di lingkungan DPR RI, Jurnal Negara Hukum berupaya menghadirkan artikel untuk menjembatani kebutuhan DPR RI dalam pelaksanaan fungsinya, baik fungsi legislasi maupun pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Jurnal Negara Hukum Edisi Juni 2018 merupakan penerbitan tahun ke sembilan, yang memuat hasil kajian literatur dan penelitian empiris, meliputi hukum pidana, hukum ekonomi, dan hukum tata negara/administrasi negara.

Publikasi tulisan yang dimuat dalam Jurnal Negara Hukum dilakukan setelah melalui proses koreksi dan seleksi dari Mitra Bestari dan Dewan Redaksi, serta diputuskan dalam Rapat Dewan Redaksi. Pada terbitan kali ini Jurnal Negara Hukum memuat 6 (enam) tulisan. Berikut akan diuraikan secara singkat isi dari setiap tulisan.

Tulisan pertama berjudul “Pelindungan HAM dalam Prosedur Penentuan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris di Indonesia”, ditulis oleh Marfuatul Latifah. Penulis mengungkapkan bahwa Prosedur pencantuman identitas pada *Consolidated United Nations Security Council Sanctions List of Suspected Terrorist Organizations and Individual* yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB sampai saat ini dianggap belum melindungi Hak Asasi Manusia bagi masyarakat internasional, khususnya prinsip untuk mendapatkan persidangan yang adil (*fair trial*). Hal tersebut karena tidak tersedianya pembelaan/klarifikasi dari objek yang akan dan/atau telah ditetapkan dalam daftar tersebut. Sementara itu, Indonesia juga mengeluarkan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris, namun prosedur pencantuman daftar tersebut hanya melibatkan pihak yudisial sebatas sebagai pemberi legalitas dari daftar melalui penetapan. Oleh karena itu, Penulis menganggap perlu dilakukan penyempurnaan prosedur bagi pencatuman identitas dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris untuk menyesuaikan dengan kesepakatan dalam Perubahan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang menyatakan bahwa sebuah organisasi terorisme dapat juga ditetapkan melalui putusan pengadilan.

Berikutnya, tulisan kedua ditulis oleh Puteri Hikmawati, berjudul “Operasi Tangkap Tangan dalam Penanganan Kasus Korupsi”. Penulis menguraikan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam penanganan kasus korupsi. Sejak tahun 2005 sampai dengan 2017 KPK telah melakukan sebanyak 77 OTT. Selain KPK, Pemerintah membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli (Satgas Saber Pungli) dengan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016, yang juga melakukan OTT berkaitan dengan pungutan liar. Namun, istilah OTT tidak terdapat dalam ketentuan hukum acara penanganan kasus korupsi. Ketentuan hukum acara hanya mengatur penangkapan dan tertangkap tangan. Oleh karena itu, permasalahan hukum dalam tulisan ini adalah apakah pelaksanaan OTT oleh KPK dan Satgas Saber Pungli telah sesuai dengan hukum acara pidana. Tulisan ini merupakan hasil penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pembahasannya, Penulis menguraikan pelaksanaan OTT oleh KPK, yang didahului dengan penyadapan, sementara mekanisme dan prosedur penyadapan harus diatur dalam UU, sebagaimana amanat Putusan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan OTT yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli berdasarkan laporan dari masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, OTT yang dilakukan oleh KPK dan Satgas Saber Pungli, dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan, tidak menyalahi hukum acara pidana. Namun, untuk harmonisasi kewenangan, penyadapan perlu diberikan kepada Kepolisian dan

Kejaksanaan yang menangani kasus korupsi, dan persyaratan tertangkap tangan dalam KUHP harus dipertegas kriteria dan syaratnya, agar pelaksanaannya tidak tergantung pada penafsiran aparat.

Sulasi Rongiyati menulis artikel mengenai "Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual pada Produk Ekonomi Kreatif", yang merupakan tulisan ketiga dalam Jurnal Negara Hukum ini. Penulis mengemukakan bahwa sebagai suatu karya kreativitas, produk ekonomi kreatif (ekraf) merupakan kekayaan intelektual yang perlu mendapat penghargaan sebagai suatu karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan memperoleh pelindungan hukum. Penelitian ini menganalisis mengenai regulasi yang dibentuk Pemerintah dalam memberikan pelindungan terhadap hak kekayaan intelektual terhadap produk ekraf dan penerapan regulasi tersebut di Kota Surakarta, Jawa Tengah dan Kota Denpasar, Bali. Melalui metode penelitian yuridis normatif dan empiris, data sekunder dan primer diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyebutkan, kebijakan pelindungan HKI terhadap produk ekraf telah dilakukan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan bidang HKI dan kebijakan daerah terkait pelindungan HKI untuk produk ekraf mengacu pada kebijakan tingkat nasional. Pelindungan preventif diberikan melalui UU berupa manfaat ekonomi bagi pelaku ekraf yang mendaftarkan HKInya. Namun, tingkat kesadaran masyarakat dan pemahaman pentingnya HKI, sifat komunal pelaku ekraf di Indonesia, dan sifat HKI yang harus didaftarkan untuk mendapat pelindungan hukum, menyebabkan pelindungan HKI untuk pelaku ekraf belum optimal. Pada tataran implementasi, menurut Penulis, kesadaran dan pemahaman pelaku ekraf atas kekayaan intelektualnya menjadi kunci keberhasilan pelindungan HKI yang dilakukan oleh pemerintah. Minimnya keberpihakan daerah berdampak pada belum optimalnya manfaat ekonomi yang diterima pelaku ekraf. Oleh karena itu, pemerintah perlu menggiatkan sosialisasi HKI dan memfasilitasi pendaftaran HKI untuk pelaku ekraf. Dukungan kelembagaan dan regulasi pada tingkat daerah juga penting dilakukan untuk mengembangkan dan melindungi produk ekraf.

Selanjutnya, tulisan keempat berjudul "Implikasi Bentuk Hukum BUMD terhadap Pengelolaan BUMD", ditulis oleh Dian Cahyaningrum. Dalam tulisannya, Penulis mengemukakan, bahwa saat ini banyak BUMD yang berkualitas rendah karena belum dikelola dengan baik. Salah satu hal yang mempengaruhi pengelolaan BUMD adalah bentuk hukumnya. Untuk itu, Penulis mengkaji implikasi dari bentuk hukum BUMD terhadap pengelolaannya. Berdasarkan hasil kajian ada dua bentuk hukum BUMD yaitu Perumda dan Perseroda. Bentuk hukum Perumda berorientasi pada pelayanan umum dan juga harus mencari keuntungan. Sedangkan bentuk hukum Perseroda berorientasi pada mencari keuntungan. Agar tujuan tersebut tercapai, Perumda dan Perseroda harus dikelola dengan baik sesuai dengan PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, selain juga harus didukung dengan SDM yang handal dan modal yang memadai. Organ Perumda dan Perseroda juga harus profesional dalam menjalankan tugasnya. Implikasi lain dari Perumda dan Perseroda adalah kepala daerah memiliki kewenangan yang besar sehingga menentukan kebijakan Perumda dan Perseroda. Akibatnya visi, misi, dan itikad baik kepala daerah menentukan perkembangan Perumda dan Perseroda. Apabila kepala daerah memiliki visi, misi, dan itikad yang baik maka Perumda dan Perseroda dapat berkembang dengan baik. Namun jika sebaliknya, maka Perumda dan Perseroda akan sulit untuk berkembang. Menurut Penulis, agar Perumda dan Perseroda dapat dikelola dan berkembang dengan baik maka kepala daerah harus memiliki visi, misi, niat baik, dan keseriusan untuk mengembangkannya; organ dan pegawai Perumda dan Perseroda harus direkrut dengan benar sesuai PP No. 54 Tahun 2017; serta organ Perumda dan Perseroda juga harus memiliki kemandirian dan independensi dalam menjalankan tugasnya tanpa ada campur tangan dari siapa pun dan dalam bentuk apa pun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tulisan kelima berjudul “Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, ditulis oleh Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata. Dalam artikel ini, kedua Penulis mengemukakan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diubah sebanyak 4 (empat) kali, namun masih mengandung permasalahan yuridis. Permasalahan yang paling sering terjadi berkaitan dengan tumpang tindihnya aturan yang ada. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman hierarki peraturan perundang-undangan yang dianggap dapat mengatasi masalah dalam undang-undang sebelumnya, ternyata juga mengalami masalah yang sama. Beberapa problematika yang ada dalam UU No. 12 Tahun 2011 berkaitan dengan dikembalikannya kedudukan ketetapan MPR, tidak tegasnya kedudukan peraturan menteri, kedudukan peraturan lembaga negara, dan peraturan desa, serta materi muatan peraturan presiden yang dianggap sama dengan peraturan pemerintah. Dalam tulisan ini dibahas mengenai legal historis dan politik hukum hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia beserta permasalahannya; dan rekonstruksi hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam pembahasan Penulis mengungkapkan bahwa pembentukan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki politik hukum masing-masing sesuai dengan rezim pemerintahan pada saat itu. Setiap hierarki memiliki problematikanya masing-masing, meskipun tujuan awalnya sama yaitu untuk menertibkan dan memperbaiki kerancuan dari peraturan sebelumnya, sehingga rekonstruksi hierarki peraturan perundang-undangan penting dilakukan agar menjamin konsistensi dan keselarasan norma-norma pada berbagai tingkatan peraturan perundang-undangan. Adapun rekonstruksi yang dimaksud adalah dengan menata kembali hierarki peraturan perundang-undangan dengan membedakannya antara peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan tingkat daerah.

Tulisan terakhir yang dimuat dalam Jurnal ini ditulis oleh Budi Suhariyanto, berjudul “Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 dalam Mengatasi Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi”. Penulis mengemukakan bahwa penanggulangan tindak pidana korporasi di Indonesia mengalami kendala akibat tidak jelasnya pengaturan penanganan tindak pidana korporasi. Dalam rangka mengatasi ketidaksempurnaan pengaturan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Pertanyaan yang dikemukakan oleh Penulis adalah apa saja kendala yang dihadapi oleh Penegak Hukum dalam upaya menanggulangi tindak pidana korporasi dan bagaimana peran Perma Nomor 13 Tahun 2016 dalam mengatasi kendala penanggulangan tindak pidana korporasi tersebut. Metode penelitian hukum normatif digunakan oleh Penulis untuk menjawab permasalahan tersebut. Secara normatif, dari berbagai perundang-undangan yang mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana, tidak dirumuskan secara detail tata cara penanganan korporasi sehingga penegak hukum mengalami kendala dalam melakukan proses ppidanaan terhadap korporasi. Pasal 79 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung memberikan dasar hukum bahwa apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung memiliki wewenang membuat peraturan untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tersebut. Oleh karena itu, Perma No. 13 Tahun 2016 dapat dijadikan pedoman bagi Penegak Hukum untuk mengatasi kendala teknis hukum acara pidana korporasi. Namun, Perma tersebut memiliki keterbatasan, sehingga diperlukan pembaruan hukum acara pidana korporasi dalam Rancangan KUHAP.

Hasil pemikiran dan penelitian yang dimuat dalam Jurnal Negara Hukum ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan pembaca serta menjadi referensi, baik untuk bahan penelitian lanjutan atau membuat kajian yang lebih mendalam, maupun perumusan kebijakan atau norma hukum. Dunia hukum selalu berkembang mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat yang dinamis, sehingga terbuka kemungkinan munculnya permasalahan hukum baru yang perlu

diselesaikan, dengan melakukan pengkajian dan penelitian, yang dituangkan dalam suatu tulisan.
Selamat membaca.

Jakarta, Juni 2018

Redaksi

NEGARA HUKUM

Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan

VOL. 9 NO. 1, JUNI 2018

ISSN: 2087-295X

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh difotokopi

PELINDUNGAN HAM DALAM PROSEDUR PENENTUAN DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS DI INDONESIA

Marfuatul Latifah

Abstrak

Prosedur pencantuman identitas pada *Consolidated United Nations Security Council Sanctions List of Suspected Terrorist Organizations and Individual* yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sampai saat ini dianggap belum melindungi hak asasi manusia (HAM) bagi masyarakat internasional, khususnya prinsip untuk mendapatkan persidangan yang adil (*fair trial*). Hal tersebut karena tidak tersedianya pembelaan/klarifikasi dari objek yang akan dan/atau telah ditetapkan dalam daftar tersebut. PBB telah berupaya memperbaiki prosedur pencantuman identitas pada *Consolidated United Nations Security Council Sanctions List of Suspected Terrorist Organizations and Individual* dengan mengadopsi *due process of law model* dalam proses pencantuman identitas. Perubahan prosedur tersebut sampai saat ini masih belum cukup memberikan perlindungan HAM bagi individu yang menjadi subjek karena belum menerapkan *due process of law* secara utuh. Hal tersebut dibuktikan dengan masih belum adanya pihak peradilan yang berwenang, bebas, dan terbuka untuk memutuskan apakah seseorang patut dicantumkan identitasnya dalam daftar tersebut. Indonesia juga mengeluarkan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris. Prosedur yang digunakan dalam mencantumkan identitas orang, organisasi, dan/atau korporasi dalam daftar tersebut telah berupaya menghadirkan pihak yudisial, namun prosedur pelibatan pihak yudisial hanya sebatas pemberi legalitas dari daftar melalui penetapan. Karena itu perlu dilakukan penyempurnaan prosedur bagi pencantuman identitas dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris untuk menyesuaikan dengan kesepakatan dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa sebuah organisasi terorisme dapat juga ditetapkan melalui putusan pengadilan agar perlindungan HAM bagi subjek yang telah/akan dicantumkan di daftar dapat terwujud.

Kata kunci: daftar terduga terorisme; perlindungan HAM; prinsip peradilan yang adil; terorisme

OPERASI TANGKAP TANGAN DALAM PENANGANAN KASUS KORUPSI

Puteri Hikmawati

Abstrak

Operasi tangkap tangan (OTT) merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam penanganan kasus korupsi. Sejak tahun 2005 sampai dengan 2017, KPK telah melakukan sebanyak 77 OTT. Selain KPK, Pemerintah membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli (Satgas Saber Pungli) dengan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016, yang juga melakukan OTT berkaitan dengan pungutan liar. Namun, istilah OTT tidak terdapat dalam ketentuan hukum acara penanganan kasus korupsi. Ketentuan hukum acara hanya mengatur penangkapan dan tertangkap tangan. Oleh karena itu, permasalahan hukum dalam tulisan ini adalah apakah pelaksanaan OTT oleh KPK dan Satgas Saber Pungli telah sesuai dengan hukum acara pidana. Tulisan ini merupakan hasil penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pembahasan diuraikan pelaksanaan OTT oleh KPK, yang didahului dengan penyadapan, sementara mekanisme dan prosedur penyadapan harus diatur dalam UU, sebagaimana amanat Putusan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan OTT yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli berdasarkan laporan dari masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, OTT yang dilakukan oleh KPK dan Satgas Saber Pungli, dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan, tidak menyalahi hukum acara pidana. Namun, untuk harmonisasi, kewenangan penyadapan perlu diberikan kepada Kepolisian dan Kejaksaan yang menangani kasus korupsi, dan persyaratan tertangkap tangan dalam KUHAP harus dipertegas kriteria dan syaratnya, agar pelaksanaannya tidak tergantung pada penafsiran aparat.

Kata kunci: operasi tangkap tangan; korupsi; KPK; saber pungli; hukum acara pidana

**PELINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
PADA PRODUK EKONOMI KREATIF**

Sulasi Rongiyati

Abstrak

Sebagai suatu karya kreativitas, produk ekonomi kreatif (ekraf) merupakan kekayaan intelektual yang perlu mendapat penghargaan sebagai suatu karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan memperoleh perlindungan hukum. Penelitian ini menganalisis mengenai regulasi yang dibentuk Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) terhadap produk ekraf dan penerapan regulasi tersebut di kota Surakarta, Jawa Tengah dan Kota Denpasar, Bali. Melalui metode penelitian yuridis normatif dan empiris, data sekunder dan primer diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyebutkan, kebijakan perlindungan HKI terhadap produk ekraf telah dilakukan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan bidang HKI dan kebijakan daerah terkait perlindungan HKI untuk produk ekraf mengacu pada kebijakan tingkat nasional. Pelindungan preventif diberikan melalui UU berupa manfaat ekonomi bagi pelaku ekraf yang mendaftarkan HKInya. Namun, tingkat kesadaran masyarakat dan pemahaman pentingnya HKI, sifat komunal pelaku ekraf di Indonesia, dan sifat HKI yang harus didaftarkan untuk mendapat perlindungan hukum, menyebabkan perlindungan HKI untuk pelaku ekraf belum optimal. Pada tataran implementasi, kesadaran dan pemahaman pelaku ekraf atas kekayaan intelektualnya menjadi kunci keberhasilan perlindungan HKI yang dilakukan oleh pemerintah. Minimnya keberpihakan daerah berdampak pada belum optimalnya manfaat ekonomi yang diterima pelaku ekraf. Oleh karenanya pemerintah perlu menggiatkan sosialisasi HKI dan memfasilitasi pendaftaran HKI untuk pelaku ekraf. Dukungan kelembagaan dan regulasi pada tingkat daerah juga penting dilakukan untuk mengembangkan dan melindungi produk ekraf.

Kata kunci: ekraf; hak kekayaan intelektual; perlindungan hukum

IMPLIKASI BENTUK HUKUM BUMD TERHADAP PENGELOLAAN BUMD

Dian Cahyaningrum

Abstrak

Saat ini banyak BUMD yang berkualitas rendah karena belum dikelola dengan baik. Salah satu hal yang mempengaruhi pengelolaan BUMD adalah bentuk hukumnya. Untuk itu kajian ini menganalisa implikasi dari bentuk hukum BUMD terhadap pengelolaannya. Berdasarkan hasil kajian ada dua bentuk hukum BUMD yaitu Perumda dan Perseroda. Bentuk hukum Perumda berorientasi pada pelayanan umum. Namun Perumda juga harus mencari keuntungan. Sedangkan bentuk hukum Perseroda berorientasi pada mencari keuntungan. Agar tujuan tersebut tercapai, Perumda dan Perseroda harus dikelola dengan baik sesuai dengan PP No. 54 Tahun 2017, selain juga harus didukung dengan SDM yang handal dan modal yang memadai. Organ Perumda dan Perseroda juga harus profesional dalam menjalankan tugasnya. Implikasi lain dari Perumda dan Perseroda adalah kepala daerah memiliki kewenangan yang besar dalam menentukan kebijakan Perumda dan Perseroda. Akibatnya visi, misi, dan itikad baik kepala daerah menentukan perkembangan Perumda dan Perseroda. Apabila kepala daerah memiliki visi, misi, dan itikad yang baik maka Perumda dan Perseroda dapat berkembang dengan baik. Namun jika sebaliknya, maka Perumda dan Perseroda akan sulit untuk berkembang. Agar Perumda dan Perseroda dapat dikelola dan berkembang dengan baik maka kepala daerah harus memiliki visi, misi, niat baik, dan keseriusan untuk mengembangkannya; organ dan pegawai Perumda dan Perseroda harus direkrut dengan benar sesuai PP No. 54 Tahun 2017; organ Perumda dan Perseroda juga harus memiliki kemandirian dan independensi dalam menjalankan tugasnya tanpa ada campur tangan dari siapa pun dan dalam bentuk apa pun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: BUMD; Perumda; Perseroda; direksi; kepala daerah

REKONSTRUKSI HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata

Abstrak

Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diubah sebanyak 4 (empat) kali, namun masih mengandung permasalahan-permasalahan yuridis di dalamnya. Permasalahan yang paling sering terjadi berkaitan dengan tumpang tindihnya aturan-aturan yang ada. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman hierarki perundang-undangan yang dianggap dapat mengatasi masalah dalam undang-undang sebelumnya, namun juga mengalami masalah yang sama. Beberapa problematika yang ada dalam UU No. 12 Tahun 2011 berkaitan dengan dikembalikannya kedudukan ketetapan MPR, tidak tegasnya kedudukan peraturan menteri, kedudukan peraturan lembaga negara, dan peraturan desa, serta materi muatan peraturan presiden yang dianggap sama dengan peraturan pemerintah. Tulisan ini akan membahas mengenai (1) legal historis dan politik hukum hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia beserta permasalahan-permasalahannya; dan (2) rekonstruksi hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun hasil penulisan ini bahwa pembentukan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki politik hukum masing-masing sesuai dengan rezim pemerintahan pada saat itu. Setiap hierarki memiliki problematikanya masing-masing, meskipun tujuan awalnya sama yaitu untuk menertibkan dan memperbaiki kerancuan dari peraturan sebelumnya, sehingga rekonstruksi hierarki peraturan perundang-undangan penting dilakukan agar menjamin konsistensi dan keselarasan norma-norma pada berbagai tingkatan peraturan perundang-undangan. Adapun rekonstruksi yang dimaksud adalah dengan menata kembali hierarki peraturan perundang-undangan dengan membedakannya antara peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan tingkat daerah.

Kata kunci: hierarki; peraturan; undang-undang; permasalahan; rekonstruksi

**KEDUDUKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 13 TAHUN 2016
DALAM MENGATASI KENDALA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORPORASI**

Budi Suhariyanto

Abstrak

Penanggulangan tindak pidana korporasi di Indonesia mengalami kendala akibat tidak jelasnya pengaturan penanganan tindak pidana korporasi. Dalam rangka mengatasi ketidaksempurnaan pengaturan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No.13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Ada pertanyaan yang mengemuka yaitu apa saja kendala yang dihadapi Penegak Hukum dalam upaya menanggulangi tindak pidana korporasi dan bagaimana peran Perma Nomor 13 Tahun 2016 dalam mengatasi kendala penanggulangan tindak pidana korporasi tersebut? Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut. Secara normatif, dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana, tidak dirumuskan detail tata cara penanganan korporasi sehingga penegak hukum mengalami kendala dalam melakukan proses ppidanaan terhadap korporasi. Pasal 79 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung memberikan dasar hukum bahwa apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung memiliki wewenang membuat peraturan untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tersebut. Perma No. 13 Tahun 2016 dapat dijadikan pedoman bagi Penegak Hukum untuk mengatasi kendala teknis hukum acara pidana korporasi. Namun, Perma tersebut memiliki keterbatasan sehingga diperlukan pembaruan hukum acara pidana korporasi dalam RKUHAP.

Kata kunci: Perma Nomor 13 Tahun 2016; penanggulangan; tindak pidana korporasi

NEGARA HUKUM

Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan

VOL. 9 NO. 1, JUNI 2018

ISSN: 2087-295X

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.

THE HUMAN RIGHTS PROTECTION ON DETERMINING THE LIST OF SUSPECTED TERRORISM AND TERRORIST ORGANIZATION'S PROCEDURE IN INDONESIA

Marfuatul Latifah

Abstract

The procedure of individual and entity inclusion in Consolidated United Nation Security Council Sanctions List of Suspected Terrorist Organization, issued by the UN Security Council are considered does not provide the real protection for human rights for the international society, particularly related to the fair trial principle. This due to the absence of the pleading/clarification mechanism for the subject that affected. The United Nations has sought to improve the procedure of inclusion in the Consolidated United Nations Security Council Sanctions List of Suspected Terrorist Organizations and Individuals by adopting the due process of law model on the determination process of identity inclusion to the list. The amendment of the procedure has not been sufficient to provide human rights protection for individual subject to the list, because it has not implemented due process of law properly. It is proven by the lack of an authorized, independent and open judiciary in order to decide whether a person should be identified to the list. Indonesia also issued a list of suspected terrorists and terrorist organizations. The procedure that use in order to determine the identity inclusion of an individual, organization, and/or corporation on the list as an attempt to present the judicial authorities, however the listing procedure only involves the judicial authorities limited as a legitimation grantor to the list through a determination. It is necessary to refine the procedures for the inclusion of identity on the suspected Terrorist List and terrorist organizations in accordance to the agreement stipulated on the Amendment of Law no. 15 year 2003, which stating that an organization of terrorism can also be determined through a court decision, so therefore the human rights protection for the subject which has been included and/or will be include to the list can be achieve.

Key words: terrorism suspected list; human rights protection; fair trial principle; terrorism

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.

HAND ARREST OPERATION IN HANDLING CORRUPTION CASE

Puteri Hikmawati

Abstract

Hand arrest operation (OTT) is one of the efforts conducted in handling the corruption cases. Since 2005 until 2017 The Corruption Eradication Commission (KPK) has conducted approximately 77 OTT. In addition to KPK, the Government established a Sweeping Illegal Levies Task Force (Satgas Saber Pungli) through the Presidential Regulation No. 87 year 2016, which also conducted OTT related to illegal levies. However, the term OTT is not mentioned on the legal provisions of the corruption case handling procedures. The provisions on the procedural law only regulated the arrest and hand arrest. Therefore, the legal issue in this paper is whether the implementation of OTT by KPK and Satgas Saber Pungli are in accordance with the criminal law procedure. This paper are the result of juridical normative and juridical empirical research, using a qualitative approach. In the study described that the implementation of OTT by the KPK, which preceded by the wiretapping, meanwhile the tapping mechanism and procedures not have been regulated in an Act, as mandated by the Constitutional Court Decision. While OTT conducted by Satgas Saber Pungli based on report of the society. Based on the research, OTT conducted by KPK and Saber Pungli Task Force, in this case the Police and Attorney General, are not violated the criminal law procedure. However, for the authorities harmonization the wiretapping authority should be given to the Police and the Prosecutor's Office whose handling the corruption cases, and the requirement hand arrest in the Criminal Procedure Code must be clarified on the criteria and requirements, so that its implementation does not depend on the interpretation of the instrument of the institution.

Key words: hand arrest operation; corruption; the corruption eradication commission; sweeping illegal levies task force; criminal law procedure

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.

PROTECTION OF THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ON CREATIVE ECONOMIC PRODUCTS

Sulasi Rongiyati

Abstract

As a result of creativity, the creative economy product (*ekraf*) is an intellectual property that needs to be recognized as an intellectual work that has economic value and receive a legal protection. This study analyzing the regulations set by the Government in providing protection against intellectual property rights (IPRs) to *ekraf*'s products and the application of such regulations in Surakarta City, Central Java and Denpasar City, Bali. Through the normative and empirical juridical research methods, the secondary and the primary data are processed and analyzed qualitatively. The result of the research stated that IPRs protection policy toward creative economy product has been done by the government through IPRs legislations and the regional policy related to IPRs protection for creative economy product referring to the national policy. Preventive protection is provided through the law in the form of economic benefits for the perpetrators who register IPRs of creative economy product. However, the level of public awareness and understanding the importance of IPRs, the communal nature of the creative economy perpetrators in Indonesia, and the nature of IPRs which must be registered in order to obtain the legal protection, cause IPRs protection for creative economy perpetrators is not optimal. At the level of implementation, the awareness and understanding of the perpetrators of the property rights become the key to the success of IPRs protection by the government. Inadequate of the regional partiality has an impact on the lack of optimalization of the economic benefits received by creative economy perpetrators. Therefore, the government should actively socializing the IPRs and facilitate the registration of IPRs for the perpetrators of the creative economy. Institutional and regulatory support at the local level is also important in order to develop and protect the creative economy product.

Key words: creative economy; intellectual property rights; legal protection

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.

THE IMPLICATION OF REGIONAL OWNED ENTERPRISES LEGAL FORM TO ITS MANAGEMENT

Dian Cahyaningrum

Abstract

These days many regional owned enterprises are still low on the quality due to they are not well managed. The one of the matter it may be caused by the regional owned enterprises legal form. This scientific study intended to analyze the implication of the regional owned enterprises legal form to its management. Based on the results of the study, there are two legal forms of the regional owned enterprises. They are regional public company (Perumda) and regional liability company (Perseroda). The Perumda is oriented to the public service. However, the Perumda also have to gain some profit. While the Perseroda is oriented to profit. In order to achieve that goals, the Perumda and the Perseroda have to be managed well based on PP no 54 year 2017, beside that have to be supported by reliable human resources and enough capital. The organs of the Perumda and the Perseroda also should be professional in performing their duties. Other implication of the Perumda and the Perseroda are to the regional leader owned a big authority to establish the Perumda and the Perseroda regulation. It caused the regional leader's vision, mission, and good intention will determine the Perumda and the Perseroda development. The Perumda and the Perseroda will be able to develop well if the regional leader's vision, mission, and intention are good. Otherwise, the Perumda and the Perseroda will be difficult to develop. In order to develop the Perumda and the Perseroda, the regional leader should have a good vision, mission, faith and serious will to develop the Perumda and the Perseroda; The organs and the employer of the Perumda and the Perseroda should be well recruited based on PP no 54 year 2017; the organ of the Perumda and the Perseroda also should be independence in performing their duties without any intervention which is not in accordance with the law.

Key words: regional owned enterprises; regional public company (Perumda); regional liability company (Perseroda); director; regional leader

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.

RECONSTRUCTION OF THE HIERARCHY OF LEGISLATION IN INDONESIA

Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata

Abstract

The hierarchy of the legislation in Indonesia has been amended 4 (four) times, however still contains the juridical issues. The most common problems are related to the overlapping of the existing rules. The Law Number 12 Year 2011 as the guidance on the hierarchy of the legislation which is considered to resolve the issues on the previous law, which was also experiencing the same problem. Some of the problems contained in Law no 12 year 2011 which related to the reposition of the People's Consultative Assembly Decree (MPR's Decree), the unclear position of the ministerial regulations, the state organs regulations, and local regulations of village. also, as well as the content of the presidential regulation which is considered to be similar as the government regulation. This paper will discuss related: (1) the legal historical and the legal policy of the legislation's hierarchy in Indonesia and its problems; (2) the reconstruction of the legislation's hierarchy in Indonesia. The results of this paper that the establishment of the legislation's hierarchy in Indonesia each has its own political law in accordance with the regime at the time. Each hierarchy have its own problems, although the original purpose is to returned the order and to correct the ambiguity of the previous legislation. Therefore, the reconstruction of the legislation's hierarchy is important to ensure the consistency and the conformity of the norms at various levels of legislation. The reconstruction which meant here is to rearrange the hierarchy of the legislation by distinguishing between the legislation in the central levels and the regional levels.

Key words: hierarchy; laws; regulation; problems; reconstruction

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.

THE ROLE OF REGULATION OF THE SUPREME COURT NUMBER 13 YEAR 2016 IN OVERCOMING THE OBSTACLES OF CORPORATION CRIMINAL INFRINGEMENT

Budi Suhariyanto

Abstract

The prevention of the corporate crime in Indonesia is constrained due to unclear regulations of the corporate crime. In order to resolve the imperfection of such regulations, the Supreme Court have issued Supreme Court Regulation No.13 year 2016 concerning the Procedures of Handling The Corruption Case Conduct by Corporations. There are questions that arise, what are the obstacles faced by the Law Enforcement in the effort to overcome the corporation criminal act and how is the role of Perma No. 13 year 2016 in overcoming the obstacles to preventing the criminal act of the corporation? The normative legal research method is used to answer the problem. Normatively, from the various laws governing the corporation as the subject of the criminal act, there is no detailed formulation related to the procedures of handling the corporation, as a result the law enforcers experienced difficulties in conducting the criminal proceedings against the corporation. Article 79 of the Law regarding the Supreme Court provides the legal basic that if there is a legal deficiency in the course of the judiciary in any case, the Supreme Court has the authority to enact legislation to fill such deficiency or the vacancies of law in certain matter. Perma No.13 year 2016 can be used as a guide for the Law Enforcement in order to overcome the technical obstacles of corporation criminal law procedure. Nevertheless Perma have a limitation therefore it required the updated of the corporation criminal procedure in Criminal Procedures Act (KUHP).

Key words: Perma Number 13 Year 2016; prevention; corporation criminal act